

Pendampingan Primkopti Kudus menuju Koperasi Modern yang Patuh Pajak

Nita Andriyani Budiman*¹, Dina Lusianti², Mamik Indaryani³, Sri Mulyani⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah

e-mail: *nita.andriyani@umk.ac.id

Abstrak

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) Kudus memiliki peran strategis dalam mendukung produsen tempe dan tahu di Kabupaten Kudus. Primkopti berupaya bertransformasi menjadi koperasi modern yang patuh pajak dengan menghadapi tantangan ekonomi melalui digitalisasi sistem akuntansi, penguatan tata kelola, dan peningkatan pemahaman perpajakan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengetahuan perpajakan, sistem pencatatan keuangan yang masih manual, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam operasional koperasi. Melalui program pendampingan yang telah dilaksanakan, Primkopti telah mendapatkan pelatihan, diskusi, serta praktik langsung dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis digital dan memahami regulasi perpajakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak, efisiensi pengelolaan keuangan, serta percepatan transformasi Primkopti menjadi koperasi modern yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntansi, manajemen, perpajakan, digitalisasi, koperasi.

Abstract

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) Kudus plays a strategic role in supporting tempe and tofu producers in Kudus Regency. Primkopti is striving to transform into a modern, tax-compliant cooperative by addressing economic challenges through the digitalization of accounting systems, strengthening governance, and enhancing tax awareness. The main challenges faced include limited tax knowledge, manual financial record-keeping systems, and a lack of technology utilization in cooperative operations. Through the implemented assistance program, Primkopti has received training, discussions, and hands-on practice in applying digital-based accounting systems and understanding tax regulations. The results of this initiative have demonstrated increased tax compliance, improved financial management efficiency, and accelerated Primkopti's transformation into a more competitive and sustainable modern cooperative.

Keywords: Accounting, management, taxation, digitalization, cooperative.

PENDAHULUAN

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) Kudus memiliki peran penting dalam mendukung usaha kecil produsen tempe dan tahu di wilayah Kudus. Koperasi ini didirikan untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah, khususnya bagi para produsen tempe dan tahu. Melalui mekanisme kerja sama yang kolektif, Primkopti bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Saat ini, Primkopti sedang dalam proses transformasi menjadi koperasi

modern yang mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola, efisiensi operasional, adaptasi terhadap dinamika pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

Koperasi modern memiliki sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi untuk dapat beradaptasi dengan konteks ekonomi, sosial, dan teknologi kontemporer. Pertama, koperasi modern harus memiliki struktur tata kelola yang transparan dan akuntabel yang memungkinkan partisipasi aktif dari anggota dalam pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan komitmen anggota (Golovina *et al.*, 2021). Kedua, integrasi teknologi dalam operasi koperasi sangat penting. Penggunaan platform digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keterlibatan anggota. Misalnya, koperasi yang memanfaatkan teknologi untuk komunikasi dan manajemen dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. Selain itu, koperasi modern juga memanfaatkan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan layanan (Chistyakova & None, 2024).

Selanjutnya, kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan anggota merupakan hal yang sangat penting. Koperasi modern harus mampu merespons fluktuasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Diversifikasi produk dan layanan serta eksplorasi pasar baru merupakan langkah penting untuk memastikan relevansi koperasi di tengah perubahan tersebut. Koperasi yang berhasil mengadopsi praktik berkelanjutan atau layanan digital akan lebih siap menghadapi tantangan pasar kontemporer (Spadaro *et al.*, 2022). Koperasi modern juga diharapkan untuk berkontribusi secara sosial, tidak hanya melalui kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan mengatasi isu-isu, seperti keberlanjutan dan keadilan sosial yang meningkatkan loyalitas anggota (Chistyakova & None, 2024).

Pengembangan sumber daya manusia di koperasi juga menjadi kunci dalam mencapai status koperasi modern. Koperasi harus menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota dan karyawannya untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar yang kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga mendorong inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi (Golovina *et al.*, 2021).

Primkopti menghadapi sejumlah tantangan dalam perjalanan menuju koperasi modern, terutama dalam hal digitalisasi akuntansi, manajemen keuangan, dan kepatuhan pajak. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan pajak di kalangan anggota dan manajemen koperasi. Tingkat pemahaman yang rendah tentang kewajiban pajak dapat menyebabkan perilaku kepatuhan pajak yang buruk, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini sering berujung pada denda dan pengawasan lebih lanjut dari otoritas pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019; Oladipupo & Obazee, 2016). Selain itu, kompleksitas undang-undang pajak yang berlaku seringkali menjadi hambatan bagi koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mahenge, 2023). Bagi Primkopti, tantangan ini dapat menghambat pengelolaan keuangan yang efektif dan mengarah pada kesalahan dalam praktik akuntansi yang berdampak pada keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, ketidakstabilan ekonomi di Kudus juga memberi dampak

signifikan terhadap koperasi. Fluktuasi ekonomi yang tidak terduga, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 dapat mengurangi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat berujung pada berkurangnya pendapatan koperasi yang mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Budiman *et al.*, 2022).

Hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak juga berpengaruh besar terhadap kepatuhan. Ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak yang mungkin timbul akibat persepsi ketidakadilan atau korupsi dapat mengurangi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpercayaan ini berpotensi menurunkan kepatuhan pajak secara sukarela (Ayoola *et al.*, 2023). Oleh karena itu, membangun hubungan positif dengan otoritas pajak sangat penting bagi Primkopti untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Terakhir, beban administratif yang timbul dari kepatuhan pajak juga menjadi tantangan bagi koperasi. Proses yang rumit dan biaya yang terkait dengan kepatuhan pajak dapat mengalihkan sumber daya dari kegiatan utama koperasi yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Bagi Primkopti, beban administratif ini perlu dikelola dengan baik agar koperasi tetap dapat berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat (Gupta, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, Primkopti perlu mengambil pendekatan multifaset, termasuk meningkatkan edukasi pajak di antara anggota dan manajemen, menyederhanakan proses perpajakan, dan mempererat hubungan dengan otoritas pajak. Pendampingan dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan regulasi perpajakan akan sangat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan koperasi. Dengan demikian, PRIMKOPTI dapat menjaga keberlanjutan usaha, mematuhi kewajiban perpajakan secara tepat, dan mendorong transformasi menjadi koperasi modern yang berdaya saing dalam ekonomi digital.

METODE

Berdasarkan analisis awal sebelum program pendampingan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Primkopti Kudus. Salah satu permasalahan utama adalah Primkopti Kudus belum memenuhi kriteria sebagai koperasi modern. Selain itu, terdapat kendala dalam pengelolaan akuntansi, termasuk kurangnya penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan, lemahnya pengelolaan arus kas, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang menyebabkan risiko ketidakpatuhan pajak.

Tabel 1 menyajikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Primkopti Kudus sebelum program pendampingan, solusi yang diterapkan, serta hasil yang dicapai setelah pelaksanaan program. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah Primkopti belum memenuhi kriteria sebagai koperasi modern, sehingga program pendampingan memprioritaskan indikator yang sesuai dengan standar koperasi modern yang kemudian meningkatkan skor indikator menjadi 85. Selain itu, digitalisasi pencatatan laporan keuangan diterapkan sebagai solusi atas pengelolaan akuntansi yang kurang efisien, menghasilkan perubahan signifikan dengan penerapan aplikasi laporan keuangan oleh Primkopti. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman mengenai

regulasi perpajakan diatasi melalui sosialisasi dan pendampingan yang akhirnya mendorong koperasi untuk lebih memahami dan patuh terhadap kewajiban pajaknya dengan pelaporan yang lebih tertib. Program pendampingan ini telah dilaksanakan selama tiga bulan, dari November 2024 hingga Januari 2025 untuk memastikan implementasi solusi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tabel Permasalahan, Solusi, dan Hasil Program Pendampingan

Masalah	Solusi yang Diterapkan	Hasil yang Dicapai
Belum memenuhi kriteria koperasi modern	Prioritas indikator pada kriteria koperasi modern	Skor indikator koperasi modern meningkat menjadi 85
Pengelolaan akuntansi yang kurang efisien	Digitalisasi pencatatan laporan keuangan	Primkopti telah menggunakan aplikasi laporan keuangan
Kurangnya pemahaman tentang regulasi pajak	Sosialisasi dan pendampingan perpajakan	Koperasi memahami dan patuh terhadap pajak dengan pelaporan yang lebih tertib

Program pendampingan Primkopti Kudus dilakukan dengan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Metode pertama adalah ceramah yang digunakan untuk menyampaikan materi terkait koperasi modern serta regulasi perpajakan. Selain itu, ceramah juga digunakan dalam pelatihan penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital. Selanjutnya, metode tanya jawab diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar dapat memahami lebih dalam berbagai aspek akuntansi dan perpajakan. Metode ini membantu peserta memperoleh klarifikasi terkait konsep yang mungkin masih membingungkan. Diskusi juga menjadi bagian penting dalam program ini, dimana peserta dapat berinteraksi langsung dengan tim pendamping untuk bertukar ide dan pengalaman terkait implementasi sistem keuangan digital dalam koperasi. Melalui diskusi ini, peserta dapat menggali berbagai solusi yang dapat diterapkan dalam operasional koperasi mereka.

Selain itu, metode rancang bangun diterapkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pencatatan keuangan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan Primkopti Kudus. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat secara efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan koperasi. Sebagai langkah praktik langsung, metode demplot atau praktik diterapkan melalui simulasi penggunaan aplikasi keuangan digital serta prosedur perpajakan dalam operasional koperasi. Metode ini bertujuan agar peserta dapat memahami penerapan teknologi dan regulasi perpajakan secara lebih konkret.

Terakhir, program ini juga mencakup pendampingan pasca pelatihan, yang dilakukan melalui evaluasi dan monitoring implementasi digitalisasi keuangan serta kepatuhan pajak selama tiga bulan setelah kegiatan utama selesai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi koperasi dalam menerapkan sistem baru yang telah diperkenalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan yang dilaksanakan selama tiga bulan (November 2024–Januari 2025) telah memberikan dampak positif bagi Primkopti Kudus dalam berbagai aspek, khususnya terkait kepatuhan perpajakan, efisiensi pengelolaan keuangan, serta transformasi menuju koperasi modern. Setiap aspek menunjukkan perubahan signifikan yang tidak hanya memperkuat internal koperasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota.

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Sebelum pendampingan, Primkopti menghadapi kendala dalam memahami regulasi perpajakan yang berisiko menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan mencakup materi tentang jenis-jenis pajak yang relevan bagi koperasi, tata cara pengisian SPT, serta tenggat waktu pelaporan pajak. Setelah program ini, Primkopti menunjukkan peningkatan dalam ketertiban administrasi perpajakan yang terlihat dari kemampuannya menyusun laporan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Koperasi juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mengakses sistem e-Filing dan e-Billing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan akurat.

2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Sebelum adanya digitalisasi, pencatatan keuangan Primkopti masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan input dan ketidaktepatan dalam pengelolaan arus kas. Pendampingan meliputi pelatihan penggunaan aplikasi keuangan digital yang dirancang sesuai kebutuhan koperasi. Aplikasi ini memungkinkan Primkopti mencatat setiap transaksi secara *real-time*, memantau arus kas masuk dan keluar, serta menyusun laporan keuangan secara otomatis. Hasilnya, Primkopti kini memiliki sistem keuangan yang lebih transparan dan terstruktur, meminimalisir kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Peningkatan ini mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan finansial berbasis data yang akurat.

3. Transformasi Menuju Koperasi Modern

Salah satu tujuan utama pendampingan adalah mendorong Primkopti memenuhi kriteria sebagai koperasi modern. Kriteria ini meliputi penerapan teknologi dalam operasional, penguatan tata kelola, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selama pendampingan, tim fokus pada prioritas indikator yang mendukung transformasi koperasi, seperti adopsi teknologi dalam akuntansi dan pajak, serta pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, skor indikator koperasi modern Primkopti meningkat menjadi 85 yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam manajemen koperasi. Transformasi ini membuka peluang bagi Primkopti untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk unggulan mereka secara digital, dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

4. Peningkatan Kepercayaan Anggota

Perubahan dalam tata kelola keuangan dan perpajakan turut berdampak pada

hubungan antara koperasi dan anggotanya. Sebelum pendampingan, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan ketidakpastian terkait kewajiban pajak menyebabkan kekhawatiran di kalangan anggota. Adanya digitalisasi pencatatan keuangan dan pelaporan pajak yang lebih tertib, anggota kini memiliki akses yang lebih jelas terhadap kondisi keuangan koperasi. Rapat anggota menjadi lebih produktif karena laporan keuangan yang disajikan bersifat *real-time* dan berbasis data, bukan sekadar estimasi. Kondisi ini memperkuat rasa percaya anggota terhadap pengelolaan koperasi, meningkatkan partisipasi aktif, dan mendorong kolaborasi untuk pengembangan Primkopti ke depan.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini berhasil memperbaiki sistem manajemen Primkopti Kudus, baik dalam hal kepatuhan pajak, pengelolaan keuangan, maupun persiapan menuju koperasi modern. Dampak positif yang dirasakan tidak hanya memperkuat internal koperasi tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota. Keberlanjutan hasil pendampingan ini akan bergantung pada komitmen Primkopti dalam memanfaatkan teknologi, memperbarui pemahaman pajak, dan menjaga transparansi finansial. Implementasi sistem digital diharapkan terus dikembangkan agar koperasi mampu bertahan dan bersaing di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.





Gambar 1. Kegiatan Program Pendampingan

KESIMPULAN

Program pendampingan telah memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan Primkopti Kudus menuju arah yang lebih modern dan efisien. Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu langkah penting yang membantu Primkopti Kudus untuk lebih transparan dan terstruktur, memudahkan pemantauan keuangan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, peningkatan pemahaman tentang perpajakan juga mempermudah Primkopti Kudus dalam memenuhi kewajiban pajak dengan lebih tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengurangi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Melalui pendampingan ini, Primkopti Kudus berhasil memperkuat fondasi pengelolaan mereka dengan menggunakan teknologi yang lebih relevan dan metodologi yang lebih profesional yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan jangka panjang koperasi. Program ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal koperasi, tetapi juga memberi dampak positif terhadap kepercayaan anggota dan *stakeholder* lainnya.

Keberlanjutan dari program pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diadaptasi oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia. Koperasi lain diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta dapat berperan lebih aktif dalam perekonomian lokal maupun nasional. Program pendampingan ini juga memiliki potensi untuk memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi digital, menjadikan mereka lebih kompetitif dan siap menghadapi masa depan yang semakin kompleks.

SARAN

Beberapa saran untuk pengabdian lebih lanjut dalam Primkopti Kudus agar berkembang secara modern, efisien, dan profesional adalah:

1. Peningkatan keterlibatan anggota: perlu memperluas sosialisasi dan pelatihan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses transformasi.
2. Penyempurnaan infrastruktur teknologi: evaluasi dan perbaikan infrastruktur teknologi koperasi serta memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan.
3. Penyusunan pedoman operasional: menyusun pedoman yang jelas dan terperinci terkait digitalisasi dan pengelolaan pajak untuk memudahkan implementasi.
4. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan: melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
5. Kolaborasi dengan pihak lain: memperluas kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan perusahaan teknologi untuk mendukung transformasi koperasi.
6. Pengembangan sumber daya manusia: fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan bagi pengelola koperasi agar lebih profesional dalam menjalankan operasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus yang telah memberi dukungan finansial terhadap kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P. E., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023). Tax Administration, Trust in Tax Authorities, and Personal Income Tax Compliance: Evidence From Nigeria. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 12–21. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.02)
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/medar-09-2018-0379>
- Budiman, N. A., Nurkamid, M., Sriyana, J., & Akhsyim. (2022). MSME Tax Compliance During the COVID-19 Pandemic. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i14.11980>
- Chistyakova, O., & None, N. (2024). Conceptual Foundations of Consumer Cooperation Sustainability. *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta Ekonomika*, 1, 16–30. <https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2024.1.2>
- Golovina, S., Mikolaychik, I. N., Poltarykhin, A. L., & Zhuravlev, P. (2021). The Impact of Human Capital on the Success of an Agricultural Cooperative (Example of 'Arla Foods'). *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 13(2), 262–283.

<https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-2-262-283>

Gupta, R. (2024). Tax Compliance Costs and Small Business Growth: A Study of Indian Microenterprises. *International Journal of Research in Finance and Management*, 7(1), 343–349. <https://doi.org/10.33545/26175754.2024.v7.i1d.315>

Mahenge, B. B. (2023). Tax Payers' Perceived Challenges on Tax Laws Compliance in Tanzania: A Survey of Few Selected Startup Entities in Arusha. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 11(1), 55–69. <https://doi.org/10.37745/ejaafr.2013/vol11n15569>

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Ibusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>

Spadaro, G., Graf, C., Jin, S., Arai, S., Inoue, Y., Lieberman, E., Rinderu, M. I., Yuan, M., Lissa, C. J. van, & Balliet, D. (2022). *Cross-Cultural Variation in Cooperation: A Meta-Analysis*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/z82tf>